

# **WARISAN SAKRAL PERGERAKAN POLITIK INDONESIA-MALAYSIA: TINJAUAN SEJARAH PERGERAKAN**

**Oleh  
Warjio, PhD**

Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol),  
Universitas Sumatera Utara (USU), Medan-Indonesia  
Email:warjio1974@gmail.com

## **Pendahuluan**

Warisan sakral pergerakan politik di Indonesia dan Malaysia bukan hanya kaya dan berbagai tetapi juga ada hubungan diantaranya. Warisan sakral ini telah membentuk, merangkai dan menghubungkan identitas pergerakan politik Indonesia dan Malaysia. Namun demikian, dalam pandangan saya, sedikit sekali sarjana yang mau memfokuskan warisan sakral tersebut dalam bentuk kajian penyelidikan. Para peneliti baik dari Indonesia maupun dari Malaysia terlalu asyik memfokuskan pada warisan sakral negara-masing-masing yang kita tahu memang kaya dan berbagai. Padahal jika para sarjana ataupun peneliti baik di Indonesia maupun di Malaysia mau memfokuskan kajian penelitian mengenai warisan sakral baik dalam bentuk perbandingan ataupun hubungan tentu akan memperkaya kajian atau warisan sakral nusantara. Di samping itu juga akan mengeratkan hubungan diantara keduanya.

Bagi saya, cara termuda untuk mengetahui warisan sakral pergerakan politik yang menghubungkan Indonesia dan Malaysia adalah dalam perspektif Sejarah. Perspektif Sejarah menjadi bagian penting untuk dapat menjelaskan bagaimana hubungan ataupun pengaruh warisan sakral pergerakan itu terjadi.

Tulisan ini akan mengungkap bagaimana warisan sakral pergerakan politik Indonesia-Malaysia muncul dan mempengaruhi.

## **Nasionalisme dan Islam Sebagai Warisan Sakral Pergerakan Politik**

Sebagaimana diketahui, setelah Perang Dunia Kedua, dua tenaga sosial yang penting adalah nasionalisme dan Islam.<sup>1</sup> Kedua-dua tenaga sosial ini, pada akhirnya menjadi begitu berpengaruh di dalam membentuk identitas “nasional” bangsa. Lebih dari itu, antara nasionalisme dan Islam yang didukung oleh organisasinya masing-masing bahkan berlomba untuk memantapkan identitas berkenaan di dalam mewarnai bangsa. Pada masa ini kaum intelektual yang memimpin partai-partai politik mulai memikirkan satu sistem negara, ideologi, atau haluan politik dan bentuk perjuangan yang sesuai bagi kehidupan bangsa di masa depan. Fenomena ini, jika kita kaitkan di Malaya, dua tenaga sosial penting yaitu nasionalisme dan Islam telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam fenomena politik menjelang merdeka.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ibrahim Ahmad, *Konflik UMNO-PAS Dalam Isu Islamisasi, Selangor* : IBS Buku Sdn, 1989, hal. 51.

<sup>2</sup> Safei bin Ibrahim, *The Islamic Partai of Malaysia : its Formative stages and Ideology*, Kelantan : Nuawy bin Ismail, 1981, hal. 3.



Bagaimanapun sebenarnya dua kekuatan sosial ini yang membentuk corak politik Malaya, banyak dipengaruhi oleh gerakan nasionalisme dan Islam di Indonesia.<sup>3</sup> Baik nasionalisme maupun Islam yang dipengaruhi Indonesia itu, sebagaimana dikatakan Funston, telah melahirkan sikap radikal yang anti penjajahan kepada organisasi intelektual dalam pemimpin partai politik di Malaya.<sup>4</sup> Satu keadaan politik yang mengedepankan aksi, fundamental dan ingin mengubah pemerintah yang berkuasa.<sup>5</sup> Madrasah maupun pondok, sekolah maupun maktab perguruan yang banyak terpengaruh gerakan kebangsaan di Indonesia merupakan asal-usul lahirnya sikap radikal ini.<sup>6</sup> Dua institusi ini lah yang banyak menyumbang transformasi politik (radikal) Indonesia ke Malaysia.

Antara institusi pendidikan yang paling berpengaruh dan menjadi cahaya baik kebangkitan dan pusat intelektual dan sastra adalah *Sultan Idris Training college (SITC)*<sup>7</sup>, di Tanjung Malim, Perak. Menurut Ibrahim Yaacob, aktivis penting di SITC, membanjirnya buku-buku, majalah maupun surat kabar antaranya *Persatuan Indonesia*, *Pewartu Deli*, *Pertja Selatan*, *Pedoman Masyarakat*, *Fikiran Rakyat*, *Soeloe Rakyat Indonesia*, *Semangat Islam*, *Seruan Al-Azhar (terbitan pelakar Indonesia dan Malaya di Mesir)* *Bintang Timur dan Bintang Hindia*, dari Indonesia yang menceritakan perjuangan kebangsaan di Indonesia ke SITC merupakan fenomena penting yang membuka pikiran pelajar dan guru-guru di SITC dalam menumbuhkan kesadaran berbangsa.<sup>8</sup> Atas usaha Ibrahim Yaacob, di SITC didirikan cabang sebuah organisasi politik yang dikenal nasionalis radikal dari Indonesia yaitu PNI (Partai Nasional Indonesia) pada tahun 1928.<sup>9</sup> Kehadiran dan pengaruh PNI di SITC ini, sebagaimana dikatakan Radin Sunarno, telah memberikan gejala politik revolusioner ke Malaya. Hal ini karena mottonya akan membawa kemedekaan Malaya yang nantinya akan menggabungkan diri dengan Indonesia.<sup>10</sup>

Berdirinya PNI di SITC sebagaimana dilakukan oleh Ibrahim Yaacob tidak terlepas dari pengaruh Cik Gu Abdul Hadi Hassan. Beliau seorang guru sejarah di SITC lepasan dari Maktab Melayu Malaka. Beliau banyak membantu membuka pemikiran pelajar-pelajar di SITC, khususnya Ibrahim Yaacob. Melalui beliau pula nasionalis Indonesia dikembangkan dengan mendirikan PNI di SITC.<sup>11</sup> Hal ini tidaklah mengherankan, sebab Cik Gu Abdul Hadi Hassan merupakan “agen nasionalis” Indonesia ke Tanah Melayu, khasnya ke SITC. Di

<sup>3</sup> N.J.Funston, *Malays Politic in Malaysia : Study of The United Malays National organizations and PartyIslam*. Kuala Lumpur : Heineman Educational Books (Asia) Ltd, 1980, hal. 32.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Firdaus Haji Abdullah, *Radicals Malay Politics : Its Origin and Early Development*, Petaling Jaya: Pelanduk Publications, 1995, hal. 6.

<sup>6</sup> *Ibid.* hal. 8.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Ibrahim Yacoob, “Menerima Pengertian Cita-cita Indonesia Raya” dalam manuskrip karangan yang tidak lengkap dan tidak diterbitkan berjudul “Mengikuti Perjuangan Indonesia Raya: Sekitar cita-cita Indonesia”, berkata pengantar dengan tarikh 19 Agustus 1951. Lihat tulisan ini dalam lampiran buku Ismaili Hussin, *Amara Dunia Melayudan Dunia Kebangsaan*, Syarahan perdana Jabatan Profesor Universiti Kebangsaan Malaysia, pada 30 Januari 1990 di Universiti Kebangsaan Malaysia, hal. 22. Lihat pula Warjio” Dari Nasionalisme Ke Sastra Politik: Kesan Kebangkitan Nasionalisme Indonesia Terhadap Terbentuknya Sastra Politik Malaysia”, kertas kerja dalam *Proceeding Seminar Internasional Pengajian Melayu ke 2* di Beijing, 8-15 Oktober 2002.

<sup>9</sup> Ramlah Adam, *MaktabMelayu Malaka 1900-1922*. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991, hal. 85; Mohd Nasruddin bin Rahman, *op.cit.*, hal. 75

<sup>10</sup> Lihat Radin Sunarno, *Malay Nationalism: 1896-1941*, Tanpa Kota Penerbit: Tanpa Penerbit, TanpaTahun Penerbit, hal. 20.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 86.



samping itu, beliau juga merupakan “agenreformasi”. Karena menjual dan sekaligus sebagai pengedar buku-buku yang membangkitkan semangat nasional Indonesia melalui toko buku miliknya, “AMHY Book Store & Co”. Buku-buku karangan aktivis PNI yang berjudul *Student Indonesia*, Dr. A. Rivai yang dilarang oleh Belanda di Indonesia, dijual dan diedarkan melalui toko buku ini.<sup>12</sup> Dalam pandangan penulis sendiri, pendirian cabang PNI di SITC oleh Ibrahim Yaacob sebagaimana dikatakan Ramlah Adam, perlu dikaji lebih dalam. Namun demikian keberadaan PNI di SITC telah membawa ideologi nasionalisme PNI<sup>13</sup> yaitu *Kesatuan Nasional, Solidaritas, Non Kooperasi, dan Swadaya*, dalam gerakan aktivitas nasional di Malaya. Dan ideologi nasional PNI, kemudian menjadi pegangan aktivitas pemimpin politik radikal di Malaya dan menjadi ciri khas dari gerakan nasionalis radikal di Malaya.

Banyak alumni dari SITC yang kemudian aktif di bidang politik, sastrawan, guru maupun administrator. Salah seorang dari alumni SITC, Ibrahim Yaacob bahkan mendirikan dan mengetuai Kesatuan Melayu Merdeka (KMM) tahun 1937. KMM yang merupakan ciri bakal dari gerakan radikal di Malaya yang didukung kuat oleh pemuda dan pelajar dari mahasiswa dari Sekolah Teknik di Kuala Lumpur dan Sekolah Pertanian, Serdang, seperti Onan Siraj dan Mustapha Hussein. Kemudian KMM didukung pula aktivis pemuda lainnya seperti Hassan Manan. A. Karim Rasyid, Isa Mohammad, yang memegang sejak 1929 sudah mengikuti sebuah partai politik Indonesia yang bercorak nasional. Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dipimpin oleh Ir. Soekarno dan Muhammad Hatta<sup>14</sup>. Menurut Mustapha Hussein sendiri, nama KMM diambil dari pergerakan *Jong Sumatran Movement*<sup>15</sup>. Tujuan KMM sebagaimana dinyatakan Ibrahim Yaacob, di samping menuntut Malaya merdeka dengan jalan *non-cooperation*, juga ingin mempersatukan Malaya kepada satu ikatan Indonesia Raya<sup>16</sup>.

Sebagai organisasi yang terdaftar, KMM memang merupakan kepanjangan dari Kesatuan Melayu Muda, tetapi secara rahasia,--untuk menghindari pantauan British, KMM berarti Kesatuan Melayu Merdeka. Organisasi ini (KMM) walaupun menurut Muhammad Hussein bergerak dengan mencontoh pergerakan *Jong Sumatra*, namun pengaruh St. Jenain, seorang aktivis partai politik Komunis Indonesia sangat besar. Pada awal pendirian KMM, sebagaimana diakui Muhammad Hussein, St. Jenain menasehatkan kepada pendiri KMM untuk mendirikan satu organisasi yang memiliki tujuan untuk dapat memerdekakan Malaya.<sup>17</sup>

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 85

<sup>13</sup> Ideologi Nasional PNI sebenarnya berpunca daripada Perhimpunan Indonesia (PI), organisasi politik mahasiswa yang kemudian melahirkan PNI. Ideologi Nasional ini kemudian dikembangkan pada tahun 1925. Untuk lebih jelas mengenai Ideologi Nasional dari PI ini lebih lanjut baca John Ingleson (terj.), *Jalan Kepengasingan: Pergerakan Nasional Indonesia Tahun 1927-1934*, Jakarta : LP3ES, 1981.

<sup>14</sup> Ibrahim Yaacob, *Sekitar Malaya Merdeka*, Jakarta: Bagian Penerangan Kesatuan Melayu Malaya, 1957, hal. 24.

<sup>15</sup> Lihat majalah *Nadi Ihsan*, September 1980. *Jong Sumatran* sendiri merupakan satu pertubuhan yang ditubuhkan pada 5 Desember 1917 yang bertujuan memperkukuh pelajar-pelajar dari Sumatera untuk menanamkan keinyapan berbangsa. Antara pemimpin organisasi ini adalah Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin. Lihat keterangan ini dalam A.K. Pringgodigdo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Jakarta : Dian Rakyat, 1961, hal. 25.

<sup>16</sup> Ibrahim Yaacob, *op.cit*, hal. 25.

<sup>17</sup> Berasaskan pengakuan Mustapha Hussein, KMM didaftarkan oleh Mustapha Hussein sendiri dengan uangnya sebesar \$ 15.00 sebagai satu organisasi sosial untuk memajukan pemuda-pemuda Melayu dalam lapangan olah raga, pelajaran, kooperatif, kesehatan, pertanian, dan berbagai bidang lagi, yang mengambil banyak peraturan-peraturan dari pertubuhan Liga Pemuda India Selangor (The Selangor Indian Youth League) dan bukan untuk tujuan politik. Ini merupakan taktis untuk mengelabui pemerintah British terhadap tujuan



St. Jenain sendiri turut hadir dalam pendirian KKM<sup>18</sup>. Komposisi keanggotaan KMM yang berasal dari berbagai golongan<sup>19</sup>, tidak saja terbatas kepada mereka yang berpendidikan tetapi juga merangkumi mereka yang bekerja pada pemerintah. Ini bermakna, ada kesadaran bersama dari anggota KMM ini terhadap bangsa Melayu.

Sayangnya, KMM tidak dapat bertahan lama. Sebelum kedatangan Jepang pada tahun 1941, dengan alasan undang-undang pertahanan, KMM dibubarkan dan dilarang oleh British. Sebanyak seratus lima puluh orang pemimpinnya telah ditahan, termasuk Ibrahim Yaacob, Ishak Haji Muhammad, Ahmad Boestamam dan St. Jenain.<sup>20</sup>

Pada masa Jepang, Ibrahim Yaacob dan anggota-anggota KMM lainnya dibebaskan. Mereka kemudian mendirikan organisasi politik baru yang juga bersifat radikal, Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung (KRIS). KRIS didirikan tahun 1945 yang kemudian menjadi Partai Kebangsaan Melayu (PKMM). Antara orang-orang yang cukup berpengaruh di dalam pendirian PKMM adalah Dr. Burhanudin Al-Helmy dan Ustadz Baharuddin Latief<sup>21</sup>. Secara organisasi, PKMM ingin seperti PNI yang dipimpin oleh Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta.<sup>22</sup> Sedangkan dari segi lambang maupun bendera, PKMM menggunakan warna Merah-Putih dan lagu resmi partai adalah lagu Indonesia raya, sebagai tanda bahwa partai ini ingin dan benar-benar mengidentikkan dirinya dengan Indonesia.<sup>23</sup> Mokhtaruddin Lasso dipilih sebagai Yang Dipertua dan Dahari Ali sebagai Setia Usaha Agong serta Arshad Anshari sebagai Bendahari Agong.<sup>24</sup> Baik Mukhtaruddin Lasso, Dahari Ali maupun Arshad Anshari, merupakan orang-orang yang dikenal radikal pemikirannya saat mengendalikan surat kabar *Suara Rakyat*.<sup>25</sup>

Sama seperti KMM, PKMM juga bertujuan memerdekakan Malaya dan kepentingan rakyat secara keseluruhan dengan berlandaskan nasionalisme dengan mempersatukan ikatan dengan Indonesia Raya.<sup>26</sup> Keinginan PKMM untuk memerdekakan Malaya dan mempersatukannya dalam ikatan Indonesia Raya ini merupakan bagian dari delapan dasar dari hasil kongres PKMM pada 30 November 1945. Delapan dasar yang digariskan PKMM ialah:

1. Mempersatu padukan bangsa Melayu, menanamkan semangat kebangsaan dalam sanubari orang-orang Melayu dan bertujuan untuk menyatakan Malaya di dalam keluarga yang besar yaitu Republik Indonesia Raya.

---

sebenarnya KKM. Lihat Insun Sony Mustapha (penyelenggara), *Memoir Mustapha Hussein: Kebangkitan Nasionalisme Melayu Sebelum UMNO*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1999, hal. 1999.

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 194-197.

<sup>19</sup> Secara lengkap Ahli Jawatankuasa KKM lihat *ibid*.

<sup>20</sup> Mohd Nasruddin bin Rahman, "Gagasan Indonesia Raya Dalam Percaturan Politik Malaya-Indonesia: Peranan Ibrahim Yaacob 1938-1950" Latihan Ilmiah yang diajukan kepada Panitia Ujian Fakulti Sastera Universiti Gadjah Mada, 1993, hal. 5.

<sup>21</sup> Mengenai keterbitan ustaz Baharuddin Latief di dalam penubuhan PKMM lihat dalam *Harakah*, 1-15 Januari 2002.

<sup>22</sup> Ahmad Boestamam, *Merintis Jalan Ke Puncak*, Kuala Lumpur : Pustaka Kejora, 1972, hal. 27.

<sup>23</sup> Ahmad Boestamam, *Dr. Burhanuddin : Putra Setia Melayu*, Kuala Lumpur : Pustaka Kejora, 1972, hal. 4.

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 28.

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 16-18.

<sup>26</sup> Lihat keterangan ini dalam kertas kerja Ahmad Adam, "Partai Kebangsaan Melayu Malaya: Sebuah Mimpi Nusantara" dalam Seminar Kebangsaan *Nasionalisme dan Pembangunan di Malaysia*, Jabatan Sejarah, Fakulti Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan, 15 November 1994.



2. Bertujuan hendak mencapai hak kemerdekaan berpidato, bergerak, berpikir dan menuntut pelajaran.

3. Membangkitkan kedudukan iktisad bangsa Melayu dengan jalan memajukan perusahaan perniagaan dan pertanian serta menaikkan tarap penghidupan bangsa Melayu.

4. Mencapai kebebasan bercocok tanam. Orang yang hendak bercocok tanam itu dibebaskan dari masyarakat sewa tanah kapan saja dan dimana juga akan dan dibebaskan pula menjual hasil usahanya di pasar perniagaan.

5. Menghendaki diberi kebebasan penuh kepada orang Melayu mendirikan sekolah-sekolah kebangsaan mereka, yaitu tempat mereka mendapat pelajaran-pelajaran dan bahasa dengan secara gratis.

6. Menghendaki diberi kebebasan mencetak buku bukunya sendiri, menggalakkan pelajaran secara demokrasi, supaya meninggikan kedudukan bangsa Melayu dalam siasat politik untuk memberikan pendidikan kebangsaan kepada orang-orang Melayu.

7. PartaiKebangsaan Melayu (PKMM) hendak bekerjasama dengan lain-lain bangsa yang tinggal dalam negeri ini hidup dengan baik dan bekerja untuk mendirikan persatuan penduduk-penduduk Malaya (*Malayan United Front*) bagi menjadikan Malaya merdeka makmur dan bahagia sebagai satu anggota Republik Indonesia Raya. Mendukung gerakan umat Indonesia dalam perjuangan mereka merebut kemerdekaan.<sup>27</sup>

Keterikatan PKMM dengan Indonesia, jelas menunjukkan pengaruh Indonesia begitu kuat dalam perjuangan dan pembentukan semangat nasionalisme di Malaya. Kenyataan ini secara jelas diungkapkan oleh salah seorang pemimpin PKMM, Ishak Hj Muhammad dalam surat kabar *The Straits Times*:

*"As to Indonesian influence in The Malay Peninsula, I can only register my pleasant surprise at the ignorance you show as to this influence on our history. If we are only a community now in this part of the Malay Archipelago, we have been a nation once, even int this tiny spot, able to hold our own against possible aggresors. We too had our golden age represented by the Malay Empire of Malacca. And who whould ever believe you if you tried to suggest that we are agent of Indonesia, now or at any other time?"*<sup>28</sup>

Keterlibatan PKMM dengan Indonesia semakin tegas dan nyata. Pada 17 Februari 1945 di Ipoh, Perak, aktivis-aktivis PKMM memperingati enam bulan kemerdekaan Indonesia yang dicapai pada 17 Agustus 194 dengan mengibarkan bendera merah putih. Pada kesempatan ini pula secara "resmi" PKMM telah mendirikan sayap pemudanya yang diberi nama Angkatan Pemuda Insyap (API) yang dipimpin oleh Ahmad Boestamam.<sup>29</sup> Sebagai sayap organisasi PKMM yang menghimpun dan membangkitkan nasionalisme pemuda Melayu, kasusan API sebagai organisasi radikal dan non koperasi tidak dapat dielakkan. Dengan semboyan "Merdeka dengan Darah"<sup>30</sup>, API seolah ingin menunjukkan bahwa perjuangan secara radikal dan tanpa kompromi. Satu jalan dalam mewujudkan kemerdekaan Malaya. API

<sup>27</sup> *Ibid.* Lihat pula Koo Kay Kim, *op.cit.*

<sup>28</sup> *The Straits Times*, 28 November 1946, sebagaimana dipetik Firdaus Haji Abdullah, *op.cit.*, hal. 90-91.

<sup>29</sup> Ahmad Boestamam. *op.cit.*, hal. 42

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 55.



percaya kemerdekaan Malaya dapat dicapai dengan kemampuan sendiri, dengan jalan radikal, cepat dan serentak.<sup>31</sup> Tetapi, keinginan belum tentu menjadi kenyataan.

Gerakan nasional kebangsaan untuk mendirikan satu bangsa Indonesia Raya yang coba diwujudkan aktivis-aktivis politik kiri di Semenanjung Malaya. Usaha Dr. Burhanuddin Al-Helmy dan Ibrahim Yaacob yang bertemu aktivis pergerakan nasional Indonesia, Ir. Soekarno dan Muhammad Hatta pada 12 Agustus 1945 di Taipei, yang singgah dalam perjalanan pulang ke Indonesia dari markas besar Jepang di Asia Tenggara, Saigon, untuk membicarakan kemungkinan bersama memproklamkan kemerdekaan dengan Indonesia, gagal. Kekalahan Jepang dalam perang dunia kedua dari kuasa Berikat, menjadi puncak kegagalan itu.<sup>32</sup> Jepang yang telah tiga tahun menduduki Tanah Melayu, setelah menaklukkan seluruh Malaya pada 31 Januari 1942<sup>33</sup>, meninggalkan harapan yang belum tercapai.

Dalam masa yang sama, Jepang telah meninggalkan kesan tersendiri bagi corak pergerakan politik Indonesia. Beberapa badan-badan organisasi seperti PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat), satu organisasi militer yang didirikan pada masa Jepang, mempunyai kesan tersendiri dalam arus transformasi gerakan kiri radikal di Malaya.

Di Malaya, antara tahun 1945-1948 gerakan aktivitas politik ditandai satu bentuk usaha untuk penentuan identitas gerakan dalam mencapai tujuan kemerdekaan Malaya. Setidaknya keadaan ini dapat digolongkan dalam golongan besar itu; yaitu, *pertama* gerakan yang mendukung perjuangan UMNO, *kedua*, yang memposisikan gerakan aktivitasnya dari UMNO.<sup>34</sup> Dalam dua pembagian ini terminologi gerakan “kiri (*left*) dan kanan (*right*)” muncul dan biasa digunakan untuk membedakan kedua gerakan itu. Secara jelas, kenyataan ini diterangkan oleh Tun Dr. Ismail bin Dato’ Abdul Rahman, bekas Perdana Menteri Malaysia. Katanya :

*“Freedom Fighters in those years (Immediately after World War II) were divided into two groups. One group believed that freedom could only be achieved through revolutionary means, whereas the other group believed in the constitutional process.*

*“British colonialists had two alternatives, namely, either to agree to granting independence to the moderate group or to take firm action in continuously combative manner in the face of armed struggle.*

*The British Government decided to concede to the nationalist group which chose the constitutional path and possessed the basis for compromise with other ethnic communities in this country.*

*It is true that independence was achieved by the moderate group, but history has also shown that the radical nationalist group also made its contribution toward the achievement of independence.”<sup>35</sup>*

<sup>31</sup> Mengenai tujuan lengkap API, lihat *Testament API dalam majalah Nadi Ihsan*, Pebruari 1981.

<sup>32</sup> Kamaruddin Jaffar, *Perjuangan dan Pemikiran Politik DR. Burhanuddin Al-Helmy*, dalam *Akademika* (jurnal), bil 15, Juli 1979, hal. 29-30.

<sup>33</sup> Arkib Negara Malaysia, *Hari Ini Dalam Sejarah*, jilid I., 1980, hal. 95.

<sup>34</sup> Khoo Kay Kim, *Malays Society*, *op.cit*, hal. 256.

<sup>35</sup> A. Karim Haji Abdullah (Ed.), *Amanat Tun Dr. Ismail*, Kuala Lumpur : Pustaka Budaya Agensi, 1974, hal. 47.



Kedua aliran gerakan yang berbeda ini masing-masing mempercayai bahwa konsep kerjasama (*cooperatif*) dan tidak kerjasama (*non cooperatif*) dapat dilakukan di dalam mencapai tujuan. Dengan keadaan yang demikian, di dalam mencapai tujuan itu, jelas muncul organisasi-organisasi (*clique*) tersendiri. Sebuah Jurnal Melayu, *Kenchana*, dalam kaitan ini menulis:

“Kini telah jelas bahwa aliran organisasi kanan (*Right Wing*) percaya bahwa cara kerjasama (*cooperation*) merupakan jalan yang dapat digunakan untuk mencapai kemerdekaan, tetapi aliran gerakan organisasi ini (*Left clique*) lebih mempercayai bahwa kemerdekaan hanya dapat dicapai bila jalan kerjasama tidak dilaksanakan dan dengan melakukan oposisi untuk mencapai kemerdekaan.”<sup>36</sup>

Atas dasar pertimbangan keyakinan dan pola dalam perjuangan ini, organisasi-organisasi Melayu yang tergabung dalam UMNO telah menampakkan bibit-bibit perpecahan internal. PKMM sebagai satu organisasi yang memang sejak awalnya menjauhkan diri dari sifat *cooperative* terhadap Inggris, di samping keinginan yang besar untuk mendirikan Indonesia Raya bersama Indonesia, telah menarik diri dari UMNO. Hal ini dilakukan melalui satu kongres pertama UMNO pada Juni 1946.

Dalam kongres tersebut, usaha PKMM untuk megidentikkan dirinya dengan Indonesia, yang diwakili oleh aktivis-aktivisnya seperti Ishak Hj Muhammad, Ahmad Boestamam, Abdur Rahman Rahim tergambar kuat ketika perjuangan untuk mengajukan bendera merah-putih, warna bendera Indonesia, sebagai bendera UMNO.

Pengajuan bendera Merah Putih dengan alasan-alasannya yang cemerlang, ketika PKMM diberikan kesempatan dalam kongres itu, dilakukan oleh Ishak Hj Muhammad yang ketika itu sebagai Presiden PKMM. Pengajuan Ishak Hj Muhammad sebagai “juru bicara” dalam pengajuan bendera merah putih itu disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, beliau adalah orang kedua PKMM, setelah Dr. Burhannuddin Al-Helmy. Kedua, beliau pandai berpidato sebagaimana aktivis gerakan nasional Indonesia, Muhammad Hatta. Ketiga, beliau lebih dikenal banyak orang karena tulisan-tulisannya yang tajam sebagai seorang wartawan. Faktor penentu yang dapat dijadikan “senjata” untuk “melobi” peserta adalah karena Ishak Hj. Muhammad adalah berasal dari Pahang.<sup>37</sup> Sebab, sebagaimana diketahui, salah satu organisasi yang sangat berpengaruh dalam UMNO adalah organisasi WATANIAH, yang berpusat di Pahang

Sambutan kongres yang dihadiri oleh 50 buah organisasi Melayu. PKMM merupakan satu-satunya organisasi kiri. PKMM mengajukan usul bendera Merah putih sebagai bendera UMNO. Usul ini begitu menggelorakan dan mendapat sambutan hangat. Bagaimanapun bendera merah-putih Indonesia, sudah sehati dengan orang Melayu di Malaya. Ketika terjadi pemungutan suara, PKMM hanya kalah satu suara saja, berbanding satu dengan usulan bendera yang juga juga warna merah putih dengan keris warna kuning di tengah. Bendera UMNO yang kita kenal sekarang ini.

Walaupun perjuangan untuk menetapkan bendera Indonesia, merah putih, sebagai lambang bendera UMNO tidak tercapai, tetapi sebenarnya dengan melihat perbandingan suara yang hanya berbanding satu, jelas menunjukkan PKMM sebagai salah satu organisasi kiri di dalam

<sup>36</sup> *Kenchana*, No.2, sebagaimana dipetik Khoo Kay Kim, *ibid*

<sup>37</sup> Ahmad Boestamam, *Merintis jalan ke Puncak*, hal. 84.



UMNO mempunyai pengaruh yang sangat besar. Dalam keadaan dimana dirasakan “ketidaksesuaian dalam UMNO” usaha untuk menarik diri dalam UMNO dirasakan demikian kuat. Walaupun dalam rapat PKMM sebelum kongres UMNO itu niat untuk keluar tidak ada. Keadaan ini jelas menjadi beban PKMM. Kata Ahmad Boestmam setelah kongres UMNO:

“Perbedaan pandangan politik diantara UMNO dan PKMM sekarang sudah jelas jauh bertentangan. Sementara kita mau kemerdekaan seratus persen bagi Malaya. UMNO hanya mau kembali kepada status quo saja. Karena perbedaan pandangan politik ini lambat laun kita pasti akan berpisah juga dengannya. Yang demikian kenapa kita tidak terpisahkan ini kita laksanakan sekarang.”<sup>38</sup>

Kata Ahmad Boestmam lagi:

“Kalau kita hendak bermaksud mengubah pandangan politik UMNO ini dari dalam saya tidak percaya kita akan berjaya melakukan sebab pemberian suara di dalamnya sangat tidak adil-tidak demokratik. Badan yang kecil diberi suara, dan badan yang besar pun diberi suara juga. Mustahil dengan suara suara itu kita akan mendapat mengubah pandangan politik kira-kira 50 buah organisasi lain yang hampir-hampir 100 suaranya, sedang badan-badan ini badan-badan kanan belaka. Hanya kita saja yang merupakan badan kiri di dalam golongan mereka.”<sup>39</sup>

Sebenarnya, pemikiran yang disampaikan oleh Ahmad Boestmam ini merupakan “oposisi” terhadap dr. Burhanuddin Al-Helmy, yang ketika mengutus wakil-wakil PKMM dalam kongres UMNO tersebut tidak ada satu mandat yang mengharuskan PKMM keluar dari UMNO. Kenyataan ini tercermin ketika Ishak Hj. Muhammad menimbulkan satu masalah yaitu tentang tidak adanya mandat yang diberikan pimpinan pusat PKMM untuk menarik PKMM keluar dari UMNO.<sup>40</sup> Bagaimanapun, Dr. Burhanuddin Al-Helmy selaku Presiden PKMM, memberikan kekuasaan penuh kepada utusan PKMM itu untuk mengambil kebijakan yang mungkin dianggap perlu. Hal ini ditegaskan lagi oleh Ahmad Boestmam:

“Benar secara tegas mandat itu tidak ada diberikan kepada kita, tetapi bukankah kita ada diberikan mandat untuk menggunakan kebijakan kita dalam menentukan tindakan selanjutnya? Artinya kalau menarik PKMM keluar dari UMNO itu merupakan tindakan dari kebijakan kita maka kita toh tidak dapat dikatakan keluar dari mandat yang diberikan kepada kita.”<sup>41</sup>

Dengan sikap oposisi PKMM keluar dari UMNO maka sudah pasti terjadi perpecahan politik diantara orang Melayu. Di samping itu, juga telah muncul “oposisi baru” di kalangan orang Melayu dalam skenario politik di Malaya. PKMM sebagai lambang atau penggerak dari perjuangan *non cooperative*, kini secara “resmi” telah memposisikan dirinya menjadi “lawan” dari UMNO.

Pada 22 Desember 1946 organisasi-organisasi kiri bukan Melayu membentuk satu badan gabungan yang dinamakan Majelis Bergerak Serentak (*Council of Joint Actions*) di bawah pimpinan Tan Cheng Lock. Organisasi yang aktif mendirikan badan gabungan ini adalah *Malayan Democratic Union* (MDU) yang para aktivis-aktivisnya terdiri dari kaum cerdik pandai yang berpendidikan Inggris. Diantara mereka adalah Philip Hoalim, Jhon Eber, Lim

---

<sup>38</sup> *Ibid.* hal. 87.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal. 88.



Kean Chye dan Gerald De Cruz.<sup>42</sup> Di dalam melaksanakan aktivitas perjuangannya ini Majelis bergerak serentak ini berpegang pada 6 prinsip perjuangan<sup>43</sup>, yaitu:

1. Malaya Bersatu, termasuk Singapura
2. Satu dewan perundangan pusat bagi seluruh Malaya dengan keseluruhan anggotanya dipilih oleh orang banyak
3. Hak-hak politik yang sama bagi semua orang yang menganggap Malaya sebagai tanah airnya dan sebagai sumpah taat setianya
4. Sultan-sultan Melayu haruslah mengambil tempat-tempat sebagai raja perlembagaan yang berdaulat penuh dan menerima nasehat rakyat melalui intitusi-institusi yang demokratik "penasehat-penasehat" Inggeris
5. Perkara-perkara yang berhubung dengan agama Islam dan adat Istiadat Melayu haruslah diletakkan dibawah penguasaan orang Melayu semata-mata
6. Perhatian khusus haruslah diberikan kepada kemajuan orang-orang Melayu.

Karena kekirian dan keprogresifan ini, Majelis Bergerak Serentak tidak sehaluan dengan UMNO yang merupakan gabungan badan-badan kanan Melayu. Tidak heran bila kemudian Majelis Bergerak Serentak menjalin hubungan dengan PKMM. Politik "mencari kawan dan kekuatan" di samping persamaan ide dan keprogresifan perjuangan, telah dipikirkan oleh PKMM untuk bergandengan bahu bersama Majelis Bergerak Serentak. Hal ini diakui oleh salah seorang aktivis PKMM, Ahmad Boestamam:

"Pertama sekali PKMM harus mengimbangi tenaga organisasi, kekuatan dan daerah pengaruh golongan kanan Melayu yang diwakili oleh UMNO yang telah ditinggalkannya. Mungkin dalam tenaga organisasi dan kekuatan PKMM tidak kalah kepada UMNO tetapi dalam pengaruh orang dapat mengatakan PKMM kalah kepada UMNO dalam arti sementara UMNO merupakan gabungan beberapa badan, PKMM hanya merupakan satu badan saja. Jadi PKMM harus dengan segera memelopori berdirinya sebuah badan gabungan organisasi-organisasi kiri Melayu"<sup>44</sup>

Berdasarkan pemikiran ini, PKMM kemudian memutuskan untuk membuat satu kongres besar organisasi-organisasi kiri yang mengambil tempat di Markaz Besar PKMM, di Batu Road, Kuala Lumpur pada 22 Februari 1947. Kongres ini berhasil mengumpulkan semua organisasi-organisasi yang dianggap kiri seperti PKMM, API, AWAS, dan GERAM (Gerakan Angkatan Muda), sebuah gerakan kiri pemuda yang berpusat di Singapura yang mengirimkan wakil-wakilnya yaitu Abdul Aziz Iskak, Abdul Samad Ismail, dan Taharuddin Ahmad.

Pada kongres ini diputuskan untuk membentuk satu gabungan organisasi kiri Melayu. Atas usul API, nama organisasi gabungan kiri itu diberi nama PUTERA, satu nama yang diambil dari nama organisasi yang dibentuk Soekarno pada masa Jepang di Indonesia, PUTERA.<sup>45</sup> Pengajuan nama PUTERA ini oleh API diterima dengan suara bulat. Kongres juga telah

<sup>42</sup> Ahmad Boestamam, *Merintis Jalan Kepuncak*, hal. 122.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal. 123.

<sup>45</sup> *Ibid.*, 124.



berhasil menentukan nama pemimpin mengendalikan PUTERA yaitu Ishak Hj Muhammad. Pemilihan Ishak Hj. Muhammad untuk memimpin PUTERA didasarkan atas beberapa pertimbangan;

1. Ishak Hj Muhammad merupakan aktivis cendekiawan yang tinggi pengetahuan Inggerisnya
2. Dr. Burhanuddin harus menumpuhkan sepenuhnya tenaga dalam PKMM yang harus memegang terus peran sebagai tenaga pimpinan kepada gabungan itu
3. Ishak merupakan Presiden PKMM. Dengan dia memimpin PUTERA, maka kemungkinan PUTERA disalagunakan dari PKMM tentu amat sukar.
4. Sebanyak-banyaknya aktivis PKMM harus ditampilkan ke hadapan supaya dapat dibuktikan bahwa golongan kiri Melayu tidak kekurangan aktivis.<sup>46</sup> Gerakan tuntutan terhadap British ini kemudian melahirkan Persekutuan Tanah Melayu pada 1 Pebruari 1948.<sup>47</sup>

Walaupun PKMM dan API yang dikenal radikal dan berhaluan ideologi “nasionalis”, tidak dapat dinafikan mereka juga menjalin kerjasama dengan organisasi beraliran agama dan “berideologi” Islam. Ini dibuktikan dengan dibukanya cabang PKMM dan API di daerah Padang Rengas dimana dibuka sekolah agama *Al-Diniyah* yang dipimpin oleh Syeik Junid, seorang reformis Islam yang berasal dari daerah Tapanuli Selatan, Sumatera Timur.<sup>48</sup> Di daerah Kelantan API dipimpin oleh Asri Muda<sup>49</sup>, seorang lulusan Maahad Ihya Assyaf Gunung Semanggol (MIAGUS), Perak. Selain dalam API, Asri juga aktif dalam PKMM. Semasa menghadiri kongres PKMM di Padang Rengas pada tahun 1946, selain dari diberi tugas untuk menyusun laporan mengenai kunjungannya ke Selatan Thai mengenai pemberontakan Haji Sulong, Mohd Asri telah diberi tugas memainkan satu sandiwara dalam bentuk sketsa dan tablo mengenai perjuangan Islam.<sup>50</sup> Di samping itu PKMM dan API juga telah didirikan di Maahad Ihya Assyarif Gunung Semanggol, atas kerjasama pimpinan PKMM, Dr. Burhanuddin Al-Helmy dan pimpinan Maahad Ihya Assyarif Gunung Semanggol, Ustaz Abu Bakar Al-Baqir.

Sesungguhnya kerjasama antara haluan nasionalisme dan Islam sebagaimana dilakukan pimpinan PKMM, API dan MIAGUS bukanlah hal yang baru. Di akhir tahun 1937, MIAGUS telah berhasil menghidupkan pelajarannya bukan saja dalam kemampuan pendidikan tetapi juga dalam kesadaran berbangsa. Pengaruh internal dan eksternal telah membentuk ideologi politik dalam MIAGUS. Para pelajar MIAGUS melonjak gembira apabila diundang masuk dalam kegiatan KKM.<sup>51</sup> Bagi pelajar-pelajar MIAGUS penyertaan mereka dalam bidang politik itu akan berarti lagi pada nusa dan bangsa. Betapa pula apabila mereka sadar bahwa agama dan politik adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yaitu suatu konsep dalam Islam yang berakar kuat sejak jaman nabi Muhammad SAW. Faktor lainnya yang menyebabkan mereka masuk dalam KKM adalah apa yang ditunjukkan oleh KKM adalah

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal. 124-125.

<sup>47</sup> *Arkib Nasional Malaysia*, jilid I, op.cit, hal. 99.

<sup>48</sup> Firdaus Haji Abdullah, *op.cit*, hal. 19.

<sup>49</sup> Mengenai Asri Muda dalam API, lihat dalam Asri Haji Muda, *Memoir Politik Asri: Meniti Arus*, Bangi: UKM, 1993.

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Nabir bin Haji Abdullah, *Maahad Il-Ihya Assyarif Gunung Semanggol, 1934-1959*, Kuala Lumpur : Jabatan Sejarah Universiti Kebangsaan Malaysia, 1976, hal. 76.



cocok dengan yang mereka pikirkan ketika itu, yaitu tidak dikungkung oleh anasir-anasir *establishment*.<sup>52</sup>

Komposisi pelajar MIAGUS yang terdiri dari berbagai keturunan itu juga mempunyai semangat Indonesia Raya seperti mana yang digambarkan dan diperjuangkan KKM. Kerjasama yang baik antara Dr. Burhanuddin Al-Helmy dan Ustaz Abu Bakar Al-Baqir karena kecocokan mereka dalam tugas dan perjuangan yang kuat berdamping dengan agama Islam dalam memajukan umat Melayu.<sup>53</sup> Ini memudahkan para pelajar MIAGUS untuk menjadi anggota KKM dan sekaligus membuka cabang KKM di MIAGUS. Kedekatan Dr. Burhanuddin Al-Helmy sebagai pimpinan PKMM dan Ustaz Abu Bakar Al-Baqir dari MIAGUS, ternyata mempunyai kesan terhadap perkembangan “perubahan” ideologi PKMM yang selama ini dikenal radikal dan terkesan “sekuler”. Dr. Burhanuddin paham, betapa soal-soal agama (Islam) dapat menarik orang banyak. Dengan alasan ini, agama Islam mulai dijadikan sebagai satu penggerak dalam politik PKMM, dan MIAGUS akan dijadikan tempat melancarkan ideologi ini.<sup>54</sup> Bagaimana persis terjadinya perubahan dan resapan “ideologi” Islam ke dalam PKMM digambarkan oleh Nabir Haji Abdullah:

“Di akhir tahun 1946, bebrapa kali Ustaz Abu Bakar Al-Baqir dapat membincangkan dengan Dr. Burhanuddin kedudukan agama (Islam) dan pendidikan di Tanah Melayu dalam pergolakan politik itu. Walaupun pertemuan mereka tidak panjang, tetapi beberapa pemimpin-pemimpin yang berasal dari MIAGUS seperti Ustaz Osman Hamzah, Yunus Yatimi yang juga murid di MIAGUS dan beberapa yang lain yang bergerak cergas dalam PKMM, API, adalah menjadi suara perantara kedua aktivis agama dan politik tersebut. Apa yang menjadi tajuk persoalan sudah dipahami masing-masing. Kepentingan agama Islam telah ketara perlu diambil perhatian yang wajar karena bentuk pemerintahan ketika itu yang berjalan pada lunas-lunas Malayan Union, adalah menolak hak resmi agama Islam. Ini adalah karena para Sultan yang asalnya berkuasa pada hal ehwal agama dan adat kini merupakan pemerintahan pada nama saja. Mereka akan mempunyai hak agama Islam, tetapi pemerintah British telah menganggap adalah wajar mendirikan Sebuah Majelis Rapat agama dimana sultan-sultan menjadi anggota dan Gabenor British sebagai Pengerusinya, yaitu seorang pengerusi beragama Kristian memimpin Majelis Rapat agama Islam.”<sup>55</sup>

Pengaruh MIAGUS dalam PKMM atau gerakan kiri radikal lainnya, semakin kuat ketika dibentuk MATA (Majelis Agama Tertinggi Malaya), yang juga diketuai oleh Ustaz Abu Bakar Al-Baqir. Mata sendiri merupakan hasil dari satu kongres yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 22 Maret 1947 di MIAGUS. Kongres dilaksanakan untuk membincangkan masalah-masalah kedudukan agama Islam, ekonomi dan pendidikan umat Melayu dalam suasana setelah Perang Dunia Kedua. Kongres ini dihadiri oleh sekitar 2,000 orang terdiri dari alim ulama dan cerdik pandai hampir dari seluruh Tanah Melayu dan juga dari Indonesia antaranya Ustaz Haji Abdul Rasyid Siddik (dari Palembang) yang juga menjadi dosen dan *qari* di MIAGUS.<sup>56</sup> Kongres ini merupakan usul yang disampaikan oleh Dr. Burhanuddin Al-Helmy dengan Ustaz Abu Bakar Al-Baqir.

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal. 76.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hal. 91.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal. 109.

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Utusan Melayu*, 30 Jun 1947, hal 2, sebagaimana dipetik oleh Nabir Haji Abdullah, *ibid.*, hal. 110-111.



Perlu dicatat, bahwa kongres ini juga menghasilkan keputusan untuk memenuhi pelawaan wakil Presiden Indonesia, Mohammad Hatta (dari PNI) untuk rapat ekonomi dan pertunjukkan ekonomi negara itu dan mengirimkan wakil-wakil yang terdiri dari Tuan Burhanuddin Haji Ganjil, Baginda Buyong dan Ustaz Abu Bakar Al-Baqir. Sayangnya, wakil-wakil ini tidak dapat memenuhi undangan wakil presiden Indonesia itu dikarenakan kesesakan pergerakan mereka, kesibukan politik kebangsaan, dan suasana yang tidak tentram sedang berlaku di Indonesia.<sup>57</sup>

Strategisnya, pendirian MATA diharapkan sebagai satu-satunya badan yang dipilih umat Islam dalam menangani masalah-masalah agama di Tanah Melayu. Ini bermakna, pendirian MATA merupakan satu tamparan yang hebat kepada golongan yang bekerja dalam organisasi ulama negeri atau pejabat agama negeri-negeri karena badan ini seperti yang dikemukakan mengurus soal-soal agama.<sup>58</sup> Pengaruh dari keadaan ini sebenarnya menuntut para Sultan tidak seharusnya lagi memegang masalah agama. Karena selagi Sultan berkehendak demikian maka pergerakan agama tidak akan baik malah akan menyalahi ajaran dan kehendak yang sewajarnya. Dengan tuntutan seperti ini, dapatlah dipahami kenapa yang ulama yang berdekatan dengan birokrasi agama yang ditopang oleh Sultan tidak hadir dalam kongres yang melahirkan MATA, bahkan sesetengah dari mereka melakukan tekanan terhadap ulama supaya tidak menyertai siding bulan Maret itu.<sup>59</sup>

Di samping tuntutan-tuntutan di atas, pendirian MATA juga mempunyai tujuan yang lain. Sebagai satu organisasi “agama”, kedekatan MATA keatas gerakan kiri ini, sebenarnya mempunyai tujuan politis, yaitu berhasrat untuk dan memihak kepada nasionalis Melayu supaya mereka tidak melampau sangat sehingga hanyut dalam perjuangan yang bukan hanya lagi banyak berunsur agama dan mementingkan bangsa dan tanah air. Jelasnya, supaya mengawal nasionalis Melayu jangan terbawa kepada paham Komunis dan yang sejalan dengan paham itu.<sup>60</sup> Kehendak ini pernah disuarakan oleh beberapa ulama yang berperan penting dalam MATA, dan dua badan ini yang lahir kemudian, juga di MIAGUS yaitu LEPIR dan Hizbul Muslimin termasuk juga Dr. Burhanuddin Al-Helmy yang sedar bahwa “kemenangan bangsa Melayu dalam apa jua tidak akan lepas dari mengheret agama ke satu tempat yang wajar dan agung.” Mereka ini mau supaya “semangat agama” dapat memberi integritas yang maksimal kepada umat Melayu untuk mendapatkan kemerdekaan dan bagi menentukan nasib agama dan bangsa.<sup>61</sup>

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa paham Komunis maupun pengaruh Komunis dari Indonesia yang dibawah oleh pelarian Komunis Indonesia, St. Jenain, telah mewarnai pembentukan organisasi politik kiri radikal di Malaya. Penomena ini menunjukkan bahwa peran agama Islam, melalui MIAGUS, dalam percaturan maupun wacana pembentukan kebangkitan nasionalis di Malaya, sangatlah berkesan. Lebih jauh, Islam telah menjadi “ideologi baru” dalam organisasi-organisasi politik kiri radikal, yang sebelumnya lebih berhaluan nasionalis sekuler bahkan juga dipengaruhi Komunis. Sedangkan, bagi Indonesia sendiri organisasi MATA mempunyai makna yang sangat dalam di dalam usaha mewarnai dan mendukung kemerdekaan Indonesia.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hal. 115.

<sup>58</sup> *Ibid.*, 121.

<sup>59</sup> *Utusan Melayu*, 2 Julai 1947, sebagaimana dipetik oleh Nabir Haji Abdullah., *Ibid.* hal.122.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hal. 141-141.

<sup>61</sup> *Ibid.*



Sebagaimana diketahui, salah satu tujuan MATA adalah menggabungkan gerakan Islam Tanah Melayu dengan gerakan Islam seluruhnya, termasuk Indonesia. Dalam pandangan MATA, Indonesia merupakan “saudara” yang harus dibantu untuk membebaskannya dari Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia, setelah diistiharkan merdeka oleh Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta pada 17 Agustus 1945. Tidaklah mengherankan bila kemudian MATA mendukung dan menjalin pergerakan dengan organisasi-organisasi yang didirikan oleh orang-orang Indonesia di Malaya seperti Persatuan Indonesia Merdeka (PIM) dan Persatuan Rakyat Kalimantan Malaya (PRKM) untuk membantu mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di samping MIAGUS, sekolah agama yang memainkan peran penting dalam menghubungkan Indonesia dan Malaya adalah Sekolah Al Diniyah, di Kampong Lalang, Padang Rengas, Perak. Sekolah ini dibangun tahun 1924 oleh Syeik Al-Junid, seorang yang berasal dari Mandailing, Sumatera Utara.<sup>62</sup> Walaupun sekolah ini memiliki kurikulum yang mengajarkan subjek-subjek komersial seperti matematik, sejarah dan bahasa Inggeris, tetapi sekolah ini juga memainkan peran penting di dalam mentransformasikan pemikiran politik, sebagai respon dari keadaan sosial politik yang berlaku. Syeik Al-Junid, pengdasar sekoloah ini, bahkan menjalin hubungan dengan aktivis politik seperti Asri Muda, yang kemudian menjadi menantunya.<sup>63</sup>

Pada penghujung tahun 1940-an, seorang aktivis organisasi Muhammadiyah (Indonesia), Ustaz Abdul Rab Tamimy datang ke Malaya.<sup>64</sup> Menurut keterangan Ustaz Abu Bakar Al-Baqir, Ustaz Abdul Rab Tamimy berasal dari daerah Minado (Manado). Beliau lulusan al Arsayadah, Surabaya. Ketika memasuki Tanah Melayu beliau berusia 30-an tahun<sup>65</sup>. Di awal pemberlakuan masa darurat 1948, bersama-sama dengan Ustaz Abu Bakar Al-Baqir, Ustaz Abdul Rab Tamimy ditahan.<sup>66</sup>

Sebelumnya, Ustaz Abdul Rab Tamimy juga telah aktif sebagai guru agama dan bahasa Arab di negeri Kelantan di beberapa sekolah agama Islam<sup>67</sup> termasuk Maahad Muhammadiyah<sup>68</sup> yang sebelum perang dikenal dengan nama *Jami' Merbau*. Di sekolah agama ini beliau mengajarkan ilmunya secara aktif. Melalui aktivitasnya ini Ustaz Abdul Rab Tamimy memberikan sumbangan kepada pergerakan rakyat di Malaya.<sup>69</sup> Beliau berhijrah ke Gunung Semanggol, Perak, untuk menyertai pergerakan Hizbul-Muslimin dan aktif memberikan tenaga kepada penyusunan sekolah-sekolah agama rakyat di bawah lembaga “Lembaga Pendidikan Rakyat (LEPIR)” yang berpusat di Gunung Semanggol yang di dirikan pada

<sup>62</sup> Khoo Kay Kim, *Malay Society 1874-1920s*, hal. 189.

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> Lihat keterangan mengenai Ustaz Abdur Rab Tamimy dalam Nabir bin Haji Abdullah, *Ustaz Abu Bakar al-Baqir Dalam Kenangan, dalam Malaysia in History* (jurnal) volume XIX No. 2 Desember 1976, hal. 28.

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> Lihat *Majalah Kelantan*, Zulhijah 1396-Disember 1976 bil. 12. Hal. 11.

<sup>67</sup> Mahaad ini didirikan melalui majelis agama Islam Kelantan yang didirikan pada tahun 1915 dalam masa pemerintahan Al-Marhum Sultan Mohammad. Mengenai sejarah penubuhan majelis agama Islam ini lihat Ucapan Yang E. hormat Mulia Tengku Sri Utama Raja, Yang dipertua Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu, *Perkembangan sekolah-sekolah Agama Arab Di Negara Kelantan Di Bawah Kelolaan Majelis Agama Islam, Kelantan dalam Majalah Kelantan*, Jamadil Awal 1394-Jun 1974, bil 6. Hal. 12.

<sup>68</sup> *Maahad Muhammadiyah* didirikan pada tahun 1917. *Maha Muhammadiyah* bahagian perempuan dibuka pada tahun 1932 yang berfungsi untuk member kemudahan didirikan agama kepada kanak-kanak perempuan. Sedangkan lima tahun kemudian dibuka pula Madrasah Muhammadiyah bahagian Arab yang ditempatkan dibahagian belakang bangunan Majelis Agama Islam Kelantan dan berpindah kepada bangunan. Jamik Merbau pada tahun 1945. Maka namanya turut berubah kepada Jamik Merbau Al-Isma'il. Lihat *Majalah Kelantan*, Jamadil Awal 1394-Jun 1974, bil 6. *Ibid.* Lihat pula Khoo Kay Kim, *Malay Society*, op.cit, hal. 173.

<sup>69</sup> *Ibid.*



September tahun 1947. Lembaga Pendidikan Rakyat (LEPIR) sendiri didirikan dengan tujuan untuk:

1. menggabungkan sekolah-sekolah rakyat. Hingga Mac, 1948, terdapat ikrar dari 70 buah sekolah untuk berusaha bersama mendapatkan pendidikan yang jitu dan berkaseselarasan.
2. LEPIR, terutamanya cendekiawan di MIAGUS (termasuk Ustaz Abu Bakar Al-Baqir) berusaha untuk membentuk kurikulum pendidikan agama untuk sekolah-sekolah yang ingin bergabung
3. Mengeluarkan buku-buku agama/Arab untuk kegunaan sekolah-sekolah agama
4. Berusaha untuk mendirikan sebuah universiti. Oleh itu telah dibentuk satu tabung yang diberi nama "derma mahasiswaan rakyat".<sup>70</sup>

LEPIR didirikan atas usaha Pengurus Badan Kebajikan Pelajaran MATA. Kelahiran MATA dilatarbelakangi atas pemikiran lemahnya pendidikan orang Melayu. Dengan ingatan perlunya "membina bangsa dengan pelajaran ruhani dan jasmani, serta memajukan bangsa melalui pembinaan sekolah tinggi, demi mengejar kehidupan dunia yang lebih sempurna di samping bersedia untuk bekalan ke akhirat", maka diundanglah orang banyak untuk menghadiri kongres organisasi LEPIR itu.<sup>71</sup>

Selain dari Ustaz Abdul Rab Tamimy, wakil Indonesia yang diundang menghadiri kongres itu adalah Tuan Haji Latif Zeki. Beliau seorang ulama dari Maktab Muhammadiyah, Sumatera; Haji Yusuf Lubis atau yang dikenal dengan sebutan Yusuf Medan, karena asalnya dari Medan. Selain mereka ini, aktivis-aktivis politik yang ikut serta dalam kongres ini adalah sebilangan orang kuat dalam PKMM termasuk Ishak Haji Muhammad dan Dr. Burhanuddin Al-Helmy.<sup>72</sup> Ketika diberi kesempatan memberikan penjelasan dalam kongres itu, Tuan Haji Latif Zeki menjelaskan perlunya penggalakkan pendirian sekolah-sekolah lebih banyak lagi sekiranya ingin maju, dan sekolah itu bukanlah dibina orang lain karena mereka itu membantu dengan muslihatnya tersendiri.<sup>73</sup> Pendirian LEPIR ini telah mendapat rangsangan serta dukungan yang kuat dari Haji Agus Salim, seorang aktivis politik dari Partai Masyumi yang ketika itu sebagai menteri Luar Negara Indonesia ketika mengadakan kunjungan ke Tanah Melayu. Menurut aktivis politik dari Masyumi itu betapa kurangnya penyelarasan kurikulum dan pengurusan sekolah agama Islam di Tanah Melayu.<sup>74</sup>

Di samping keinginan dan usaha-usaha untuk memartabatkan kedudukan agama Islam di Tanah Melayu sebagaimana ditunjukkan oleh MATA. Di samping itu untuk memajukan orang Melayu dalam bidang pendidikan sebagaimana ditunjukkan dalam LEPIR. Sebenarnya ada satu lagi keinginan yang belum terlaksana yang menyelimuti aktivis-aktivis politik Tanah Melayu. Keinginan itu adalah pendirianpartai politik Islam. Aktivis politik Melayu seperti Dr. Burhanuddin Al-Helmy sendiri secara sadar atau tidak sadar telah mengibarkan satu rupa

---

<sup>70</sup> Nabir Haji Abdullah., *loc.cit.*

<sup>71</sup> *Ibid.*, hal. 148.

<sup>72</sup> *Ibid.*, hal. 149.

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> *Ibid.*, hal. 151.



harapan akan lahirnya satu bentuk partai yang berteraskan agama Islam karena umat Melayu hanya akan langsung hidup berkeyakinan setelah agama dan tata susilanya terjamin.<sup>75</sup>

Alasan lainnya, menurut pandangan penulis, hal ini disebabkan kedudukan organisasi-organisasi politik “kiri” yang bukan Melayu seperti AMOJA, MDU dan MCP, semakin kuat. Mereka ini, bukan saja coba menarik organisasi-organisasi Melayu seperti PKMM, API, PUTERA bergabung bersama mereka, tetapi lebih dari sebenarnya menjauhkannya dari Islam. Ini dapat dilihat dengan memahami begitu agresifnya aktivis-aktivis dari MIAGUS, sebagai pusat gerakan Islam, seperti Ustaz Abu Bakar Al-Baqir menarik organisasi-organisasi Melayu ini dalam “lingkaran” MIAGUS. MIAGUS sendiri memandang usaha dan tanggungjawab MATA untuk mengembalikan kuasa agama dari tanah “raja” ke dalam MATA terasa sangat berat, dan untuk itu perlu partai politik Islam yang dapat memperjuangkannya. Dalam keadaan ini sebenarnya, “ideologi Islam” sebagaimana yang diperjuangkan MIAGUS sedang berdepan dan “berperang” dengan ideologi sekuler maupun Komunis dari organisasi-organisasi politik bukan Melayu itu.

Bagi MATA sendiri, partai politik Islam yang dapat ditiru untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam di Tanah Melayu adalah partai politik Islam Masyumi Indonesia. Idea dan niat peniruan yang demikian telah lama dicetuskan oleh pihak MATA dan hingga awal tahun 1948 barulah kasusanggupan pihak mereka (Masyumi) mulai diyakinkan akibat dari sokongan yang diterima MATA dan suasana politik Tanah Melayu dewasa itu.<sup>76</sup> Pada 28 Januari 1948, seorang anggota MATA, Al-Hamidi, telah menulis di akhbar Utusan Melayu dengan judul *‘Partai Islam Dalam Perancangan Setahun Dulu Sudah Dirancang Soal Partai Islam Seperti Masyumi dan Wanyasia.’* Dalam tulisannya ini, Al-Hamidi menjelaskan bahwa MATA sebenarnya memang mempunyai keinginan mendirikan satu partai politik Islam seperti Masyumi di Indonesia.<sup>77</sup>

Dengan keinginan untuk meniru partai politik Islam Masyumi, dibentuklah satu panitia untuk kongres yang direncanakan pada 31-16 Maret 1948 membicarakan pendirian partai politik Islam itu yang terdiri dari PKMM, API, MATA, LEPIR dan UMNO. Penglibatan UMNO yang diwakilkan oleh Sidin, lebih terkasusan sebagai wakil peribadi saja. Hal ini nantinya terlihat bukan saja UMNO tidak merestui sidang-sidang panitia ini selanjutnya, namun sebenarnya UMNO sendiri telah menolak semua jenis pergerakan berpusat di MIAGUS. Kongres ini bertujuan untuk membentuk partai Islam itu berusaha meninggikan tarap dan derjat Muslimin dalam pelajaran, ilmu pengetahuan, ekonomi, dalam politik dan dalam sosial Islam. Tujuan ini haruslah disandarkan pada al-Qur’an dan Sunah Rasul. Di samping itu peran partai Islam yang diajukan haruslah melebarkan sayap perjuangannya yaitu memberikan dukungan kepada umat Melayu untuk bekerjasama dengan umat muslimin sedunia, memakai azas Islam untuk mencapai kemuliaan dan kejayaan yang dijamin Allah.<sup>78</sup>

Di samping membicarakan persoalan utama untuk mendirikan partai politik Islam, kongres itu juga sekaligus akan membincangkan pendirian kolej atau universitas Islam (rakyat), derma pendidikan dan masalah ekonomi. Untuk mensukseskan acara ini, pihak panitia juga akan mengundang beberapa aktivis partai politik Islam Masyumi seperti Kyai Masykur,

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> *Ibid.*, hal. 159.

<sup>77</sup> *Utusan Melayu*, 28 Januari 1948, sebagaimana dipetik Nabir Haji Abdullah., *ibid.*

<sup>78</sup> *Ibid.*, hal. 163.



seorang ulama yang memang telahpun terkenal dan sering memberikan syarahan di Singapura dan Johor diawal tahun 1948. Beliau merupakan tokoh Masyumi dari Sumatera Barat.<sup>79</sup> Aktivis lainnya yang dijemput adalah Tengku Osman, tokoh politik Masyumi dari organisasi Al Wasliyah, Medan.<sup>80</sup>

Akhirnya kongres di MIAGUS yang diadakan untuk mempersatukan seluruh “orang Melayu” ini telah dihadiri oleh berbagai golongan yang terdiri dari 50 orang wakil pergerakan baik pergerakan-pergerakan tempatan maupun pergerakan Indonesia seperti PKMM (Partai Kebangsaan Melayu Malaya), API (Angkatan Pemuda Insyaf), Persatuan Indonesia Merdeka (PIM) yang ada di Tanah Melayu dan lebih dari 4.500 orang dari jauh dan tempatan<sup>81</sup> dan didukung kuat oleh penduduk kampung di sekitar Gunung Semanggol sendiri.<sup>82</sup> Menurut pemimpin sekolah Agama Maahad II Ihya Assyariff Gunung Semanggol, Ustaz Abu Bakar al-Baqir, pengaruh Masyumi begitu ketara sekali di dalam kongres ini yang sekaligus telah mengilhami kelahiran Hizbul Muslimin, terutama sekali melalui aktivis-aktivis gerakan Islam yang tergabung dalam Masyumi, seperti *Muhammadiyah* dan *Alwasliyah* dari Sumatera.<sup>83</sup> Malah ketika kongres ini dibuka, lagu Masyumi yaitu *Selamat Masyumi* menjadi lagu resmi yang telah dinyanyikan di dalam kongres itu.<sup>84</sup>

Tokoh Masyumi yang turut memberikan ucapan di dalam kongres itu adalah Ustaz Abdul Rab Tamimi, selain dari aktivis-aktivis Tanah Melayu seperti Asri Haji Muda, dan Dr. Burhanuddin Al-Helmy yang mewakili Partai Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM). Beberapa keputusan yang telah dibuat dalam kongres itu ialah:

1. Pembentukan partai politik Islam yang diberi nama Hizbul Muslimin;
2. Pembentukan Pengurus Pusat Perekonomian Melayu Malaya;
3. Pembentukan Lembaga Pendidikan Rakyat yang bernama Universiti Hang Tuah; dan
4. Pembentukan Tabung Derma Pendidikan Tinggi.<sup>85</sup>

Kesan terpenting dari kongres itu ialah pembentukan partai politik Islam Hizbul Muslimin atau ringkasnya HAMIM.<sup>86</sup> Nama Hizbul Muslimin yang sebenarnya telah dicadangkan oleh Ustaz Abu Bakar al-Baqir<sup>87</sup> itu telah disokong kuat oleh beberapa orang peserta kongres

<sup>79</sup> *Utusan Melayu*, 9 Mac 1948, sebagaimana dipetik Nabir Haji Abdullah., *ibid*, hal. 60.

<sup>80</sup> *Ibid*.

<sup>81</sup> Lihat kembali majalah KRIS., *op.cit*. hal. 35.

<sup>82</sup> Kongres yang telah mendapat bantuan beras sebanyak 1600 gantang dari penduduk kampung Gunung Semanggol dan menghabiskan 1500 gantang beras serta wang \$2000.00. Lihat kembali majalah KRIS, April 1948, *ibid*., hal. 47.

<sup>83</sup> *Ibid*. hal. 168.

<sup>84</sup> Nabir Hj Abdullah, *Maahad*., *op.cit*., hal. 169.

<sup>85</sup> *Ibid*.

<sup>86</sup> Wawancara penulis dengan tokoh-tokoh PAS; ustaz Hassan Sukri, (15 Juni 2001 di Pejabat PAS, Kuala Lumpur), Mohd Hj Yaacob (6 Juni 2002 di Kelantan), Ustaz Salahuddin (23 September 2001 di Kelantan). Lihat pula majalah KRIS, 4 April 1948, Lihat pula Asri, *Memoir Politik Asri: Meniti Arus*, Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 1993; Nabir bin Hj Abdullah, *Maahad II Ihya Assyariff Gunung Semanggol*, loc.cit.

<sup>87</sup> Ustaz Abu Bakar Al-Baqir merupakan keturunan Jawa yang berasal dari daerah Kendal, Jawa Tengah. Nama lengkap beliau adalah Abu Bakar bin Moh. Said bin Haji Abdul Jabar bin Haji Abdul Raof. Beliau dilahirkan pada tahun 1907 di Gunung Semanggol. Pada masa pendidikannya, selama enam tahun beliau belajar di sekolah pondok al-Rahmaniah (1919-1924), Gunung Semanggol. Beliau kemudian menyambung sekolah di Dairatul



termasuklah Ustaz Abdul Rab Tamimy<sup>88</sup> dan Dr. Burhanuddin Al-Helmy dari PKMM.<sup>89</sup> Bagi PKMM sendiri, “bekerjasama” dengan pergerakan kebangsaan Indonesia dan aktivis-aktivis politiknya bukanlah sesuatu yang baru. PKMM sendiri ketika didirikan menurut para penggagasnya seperti Ahmad Boestamam dan Ibrahim Yaacob adalah ingin mencontohi pergerakan kebangsaan di Indonesia. Sala satu pergerakan kebangsaan Indonesia yang menjadi “kiblat” PKMM adalah Partai Nasional Indonesia (PNI) yang ketika itu dipimpin oleh Ir. Soekarno.

Tujuan utama pembentukan Hizbul Muslimin adalah untuk mencapai kemerdekaan, membangunkan masyarakat berdasarkan tuntutan Islam dan menciptakan Malaya sebagai sebuah negara Islam merdeka.<sup>90</sup> Dari segi organisasi partai juga dapat dikatakan bahwa Hizbul Muslimin coba mencontohi Masyumi.<sup>91</sup> Adapun pengurus HAMIM ketika didirikan adalah:

1. Ketua Umum : Ustaz Abu Bakar Al-Baqir
2. Sekretaris Agung : En. Yaacob bin Hitam
3. Ketua I : Ir. Haji Arifin (peserta jurutera JKR)
4. Ketua II : 1. Haji Husin Che Dol, bertanggungjawab  
di bagian Utara  
2. Daud Abdul Jamil, bertanggungjawab di  
Bagian Pantai Timur<sup>92</sup>.

Sayangnya, cita-cita politik Islam di Tanah Melayu yang diperjuangkan melalui Hamim tidak bertahan lama. British akhirnya menarapkan harapan menggunung elit politik Islam Tanah Melayu melalui penyampaian Undang-Undang Darurat 1948. Hamim dibubarkan atas tuduhan Hamim organisasi Komunis. Ini lah satu episode mengenai percobaan awal gerakan politik Islam di Tanah Melayu. Satu percobaan yang mengilhami bagi lahirnya gerakan politik Islam lanjutan.

---

Ma'rif Wataniah, Kepala Batas, Seberang Perai Utara. Di sini beliau banyak belajar dengan ustaz Abdullah Pak Ahim, sala seorang ulama yang kemudian menubuhkan Partai Islam SeMalaysia (PAS). Keterangan lebih lanjut mengenai ustaz Abu Bakar al-Bakir lihat dalam tulisan Nabir bin Haji Abdullah, *Ustaz Abu Bakar al-Bakir Dalam Kenangan, dalam Jurnal Malaysia in History*, volume XIX, Number 2, Desember 1976, hal. 23-35.

<sup>88</sup> Sedikit keterangan mengenai Ustaz Abrab Tamimy ini, lihat dalam majalah *Kelantan*, Disember 1976, hal. 11.

<sup>89</sup> Keterangan mengenai perkaitan antara PKMM dan PNI lihat dalam Ahmad Boestamam, *Merintis Jalan KePuncak*, Kuala Lumpur: Penerbit Pustaka Kejora, 1972; Ibrahim Yaacob, *Malaya Merdeka*, Tanpa Kota Penerbit: Penerbit Kesatuan Malaya Merdeka Bahagian Penerangan, Tanpa Tahun Penerbit.

<sup>90</sup> N.J. Funston, *Malays Politics In Malaysia: A Study of UMNO and PAS*, Kuala Lumpur: Heineman Educational Books (Asia) LTD, 1977, hal. 90.

<sup>91</sup> Nabir Hj Abdullah, *Maahad II Ihya*, op.cit.

<sup>92</sup> Lihat kembali Asri, *Memoir Politik Asri*, op.cit., hal. 34-35.